

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perdana Menteri Shinzo Abe membentuk Departemen Pertahanan pada tanggal 9 Januari 2007. Departemen Pertahanan (Dephan) Jepang merupakan perluasan dari Badan Pertahanan Jepang yang dibentuk pada tahun 1954. Pembentukan Dephan ini merupakan langkah awal PM Abe dari rencananya untuk merevisi konstitusi 1947, terutama pasal 9 yang membahas tentang pembatasan terhadap kekuatan militer yang wajib dipatuhi oleh Jepang.

Perluasan fungsi Badan Pertahanan Jepang menjadi Dephan ini menandakan keinginan PM Abe untuk meningkatkan kekuatan militer Jepang, sedangkan kekuatan militer Jepang diatur dalam pasal 9 konstitusi 1947.¹ Pasal 9 konstitusi 1947 menyatakan bahwa Jepang kehilangan hak perang (hak menggunakan perang sebagai sarana penyelesaian sengketa internasional) dan menolak potensi perang. Hal ini berarti Jepang dilarang menggunakan angkatan bersenjata. Jepang hanya boleh memiliki Badan Pertahanan yang memiliki misi untuk membina ketertiban umum, perdamaian dan mempertahankan keamanan Jepang terhadap agresi langsung maupun agresi tidak langsung. Badan Keamanan Jepang hanya bersifat defensif semata dan dilarang secara kolektif keluar dari Jepang. Berbeda dengan Badan Pertahanan Jepang, Departemen Pertahanan Jepang memiliki hak yang lebih luas. Departemen Pertahanan Jepang

¹ Konstitusi 1947 dibuat oleh Amerika Serikat (AS), sebagai negara yang mengalahkan Jepang di Perang Dunia II. Harapan AS membuat konstitusi 1947 yaitu agar Jepang menjadi negara yang demokrasi dan yang lebih penting lagi menjadi negara yang demiliterisasi, yang berbeda dengan

dapat mengatur rencana anggarannya sendiri dan juga mampu untuk mengirimkan pasukan-pasukannya untuk dikirim ke negara-negara yang sedang berkonflik untuk menjadi pasukan perdamaian.

Perluasan fungsi Badan Pertahanan Keamanan Jepang menjadi Dephan sangat bertentangan dengan pasal 9 konstitusi 1947 yang terdapat batasan-batasan di dalam penggunaan militer. Oleh karena itu, PM Abe juga menginginkan untuk merevisi konstitusi 1947. Rencana revisi konstitusi 1947 dan pembentukan Dephan mendapat banyak kritikan, baik dari dalam maupun dari luar negeri Jepang. Banyak pihak yang menilai, apabila Jepang membentuk Dephan (yang merupakan realisasi dari rencana PM Abe dalam merevisi konstitusi 1947) ditakutkan Jepang akan kembali seperti pada era Perang Dunia II (PD II) yang lebih mementingkan kekuatan militer demi menjajah negara lain dan menunjukkan bahwa Jepang lebih hebat bidang militernya dari negara-negara Barat.

Pembentukan Dephan Jepang mendapatkan banyak tentangan dari banyak pihak, namun PM Abe tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan Dephan sebagai ganti dari Badan Pertahanan Nasional Jepang.

Inilah yang mendasari penulis di dalam pemilihan judul **Pembentukan Departemen Pertahanan Jepang Era Perdana Menteri Shinzo Abe**

B. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Mengetahui latar belakang Perdana Menteri Shinzo Abe dalam membentuk Departemen Pertahanan Jepang.
2. Untuk mengetahui reaksi-reaksi dari dalam maupun luar negeri mengenai pembentukan Departemen Pertahanan Nasional Jepang.
3. Mengetahui bentuk militer Jepang pra pembentukan Departemen Pertahanan Nasional Jepang.

C. Latar Belakang Masalah

Konstitusi 1889 merupakan konstitusi Jepang sebelum Jepang memberlakukan konstitusi 1947 sebagai undang-undang dasar negaranya. Perbedaan dasar konstitusi 1889 dengan konstitusi 1947 adalah mengenai demokrasi, hak warga negara dan militer.²

Inti dari konstitusi 1889 adalah doktrin kaisar sebagai keturunan Dewa.³ Hal ini berarti kedaulatan negara berada di tangan kaisar. Kaisar memiliki hak kuasa yang luas. Kaisar berkuasa untuk memilih kabinet dan pejabat tinggi birokrasi, berkuasa untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan negara dan juga memiliki hak veto untuk merubah undang-undang yang ada. Kaisar juga ditunjuk sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Jepang.

² Theodore McNelly. *Politics and Government in Japan*, 2nd edition, Boston, Houghton Mifflin Company, 1972, hal. 32.

³

Pernyataan-pernyataan konstitusi 1889 yang memberikan wewenang luas kepada kaisar berdampak buruk bagi perkembangan Jepang kedepannya, karena kaisar dapat bertindak sewenang-wenang dalam setiap keputusannya.

Jepang pada masa pemberlakuan konstitusi 1889 memiliki tujuan untuk sejajar dengan negara-negara Barat.⁴ Kaisar yang memiliki kekuasaan didalam mengambil dalam rangka mencapai tujuan tersebut, melakukan tindakan-tindakan yang sama dengan yang dilakukan oleh negara-negara Barat, agar mendapat *prestige* yang sama dengan yang didapat oleh negara-negara Barat. Dengan begitu bangsa-bangsa lain memandang tinggi Jepang sama dengan memandang tinggi negara-negara Barat. Jepang melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, sebagai contoh yaitu memperluas wilayah kekuasaan Jepang, seperti ke wilayah Cina, Korea dan negara-negara Asia Tenggara. Untuk dapat memperluas wilayah ke luar Jepang, maka kaisar sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Jepang memprioritaskan kekuatan militernya.

Dengan lebih memprioritaskan kekuatan militer Jepang, maka banyak perang yang dilakukan oleh Jepang. Salah satunya adalah Perang Cina-Jepang pada tahun 1894-1895.⁵ Perang Cina-Jepang disebabkan oleh Jepang yang ingin menguasai wilayah Korea. Korea yang tidak memiliki pasukan perang yang cukup harus meminta bantuan Cina (dengan sistem upeti). Jepang memenangkan peperangan ini. Cina yang membantu Korea melawan Jepang membuat Cina harus merelakan sebagian wilayahnya. Cina harus menyerahkan wilayah Taiwan,

⁴ Ryousuke Ishii. *Sejarah Institusi Politik Jepang*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hal 153.

⁵ W.G.Beasley. *op cit.*, hal. 302.

sedangkan Korea harus menyerahkan wilayah Liaotung di Manchuria (merupakan jalur utama pelayaran antara Korea dan Peking) kepada Jepang.

Perebutan Liaotung oleh Jepang, ternyata ditentang oleh Rusia. Rusia yang tidak menginginkan Jepang menguasai daerah yang memiliki banyak manfaat bagi Rusia terutama bagi perdagangan. Rusia ingin Jepang melepaskan Liaotung. Akibatnya, terjadilah Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904-1905.⁶ Perang ini dimenangkan oleh Jepang. Kemenangan Jepang mengakibatkan wilayah Liaotung kembali kepada Jepang. Dengan kemenangan Jepang atas Rusia tersebut, maka dapat menaikkan gengsi Jepang terhadap negara-negara maju.

Jepang juga memperluas daerah kekuasaannya ke Asia Tenggara, salah satunya adalah Indonesia. Tujuan-tujuan Jepang di Asia Tenggara yaitu untuk memperoleh dukungan-dukungan bagi usaha-usaha perang di luar daerah kekuasaannya (khususnya PD II), serta Jepang juga membutuhkan sumber-sumber alam dan tenaga kerja untuk kelanjutan perang-perang Jepang.⁷

AS menentang tindakan Jepang yang terus melancarkan strategi perluasan wilayah ke Asia Tenggara, dikarenakan Jepang mengganggu daerah kekuasaan Sekutu (AS termasuk di dalam pasukan Sekutu) di daerah Asia Tenggara. Negara-negara Eropa dan AS meminta Jepang untuk melepaskan daerah kekuasaannya, namun Jepang menolak. AS pun membatasi hubungan perdagangannya dengan Jepang serta melarang pengiriman besi tua dan minyak ke Jepang.⁸ Jepang yang tidak mau melepaskan daerah kekuasaannya mau tidak mau ikut serta di dalam

⁶ J. B. A. F Mayor Polak. *Sejarah Dunia Modern: Suatu Pembahasan Sosiologis, Ekonomis dan Politik*. Gunung Agung Bali, Denpasar, 1975, hal. 204.

PD II dengan berkoalisi dengan Jerman dan Italia. Dengan ikutnya Jepang dalam PD II, menyebabkan hubungan Jepang dengan AS menjadi memburuk.⁹

Strategi Jepang untuk memenangkan PD II yaitu dengan menyerang pangkalan militer Sekutu yang dipergunakan untuk memperbesar kekuatan militernya. Oleh karena itu, Jepang merencanakan untuk menyerang pangkalan militer AS. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan armada AS di Pasifik, Pearl Harbour, Hawaii.¹⁰

AS yang tidak mau tinggal diam atas penyerangan Jepang tersebut, merencanakan tindakan balasan terhadap Jepang. Akhirnya, Jepang tidak dapat berkutik lagi, setelah AS menyerang Jepang dengan menggunakan senjata baru (bom atom) di dua wilayah Jepang yaitu Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945).¹¹

Pemboman AS terhadap wilayah Jepang, memaksa Jepang untuk menyerah kepada Sekutu terutama AS. Dengan menyerahnya Jepang terhadap AS, maka Jepang harus menerima syarat-syarat yang diberikan AS yaitu Jepang wajib menyetujui Deklarasi Postdam. Deklarasi Postdam berisi penerimaan Jepang terhadap pendudukan Sekutu yang diwakili oleh AS terhadap wilayah Jepang dari tahun 1945 hingga tahun 1952. Dengan Jepang menyetujui Deklarasi Postdam pada tanggal 26 Juli 1945, maka dimulainya pendudukan AS di Jepang.¹²

Pendudukan AS terhadap wilayah Jepang membuat Jepang mengalami banyak perubahan. AS membuat Jepang menjadi negara yang demokrasi dan

⁹ Takafusa Nakamura. *Perkembangan Ekonomi Jepang Modern, Kementerian Luar Negeri Jepang*, 1985, hal. 62.

¹⁰ W.G.Beasley. *op cit.*, hal. 319.

¹¹ *Ibid*, hal. 323

¹² Ryoussuke Ishii. *op cit.*, hal. 163.

demiliterisasi. Pemerintah Jepang mengakhiri pemerintahan yang militer dan beralih ke pemerintahan yang demokratis.

Pada tanggal 2 Oktober 1945, Markas Besar negara-negara Sekutu resmi didirikan di Tokyo dibawah pimpinan Panglima Tertinggi pasukan-pasukan Sekutu, Douglas MacArthur.¹³ Konstitusi 1889 yang menjadikan kaisar sebagai pemegang kedaulatan Jepang diganti oleh AS dengan konstitusi 1947 yang menjadikan kedaulatan di tangan rakyat. Konstitusi 1947 terpaksa diterima oleh Jepang sebagai konsekuensi kejahatan Jepang selama PD II. Konstitusi 1947 menjadikan Jepang menjadi negara yang demokratis.

Konstitusi 1947 yang dibuat oleh AS ini berisi 11 bab dan 103 pasal. Inti dari prinsip-prinsip konstitusi 1947 sangat berkebalikan dengan konstitusi 1889. Konstitusi 1889 lebih mengedepankan kekuasaan kaisar yang penuh terhadap Jepang, sedangkan pada konstitusi 1947 menyatakan bahwa kekuasaan di tangan rakyat dengan Diet (Parlemen Jepang) sebagai perwakilan dalam pemerintahan.¹⁴

Dalam konstitusi 1889, Diet terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Rendah dan Dewan Tinggi. Dewan Rendah dipilih oleh rakyat tetapi hanya yang laki-laki saja.¹⁵ Dewan Tinggi dipilih oleh kaisar. Dewan Tinggi terdiri dari anggota keluarga kaisar, bangsawan serta orang-orang yang dianggap berjasa pada kaisar. Dewan Tinggi didalam konstitusi 1889 tidak mewakili rakyat, namun mewakili kaum feodal. Perdana Menteri dan para kabinet pun dipilih oleh kaisar, sehingga Dewan Rendah tidak memiliki wewenang apapun di dalam pemerintahan. Segala

¹³ *Ibid*, hal. 166.

¹⁴ Sayyidiman Suryohadiprojo. *Belajar dari Jepang: Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan Hidup*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1987, hal 59.

¹⁵ *Ibid*, hal. 57.

saja). Dewan Rendah dipilih dari 3-5 anggota dari tiap-tiap distrik Jepang. Dewan Tinggi terdiri dari 252 anggota, yang dipilih berdasarkan representasi proposional dan pemilihan tiap-tiap distrik Jepang.¹⁸ Jadi kaisar tidak memiliki peranan penting didalam pemilihan perdana menteri, kabinet, maupun Diet. Segala kebijakan berada di bawah kuasa Diet, sebagai perwakilan rakyat. Kaisar hanya dijadikan simbolik semata.

Pasifisme atau demiliterisasi Jepang diatur dalam pasal 9 konstitusi 1947.¹⁹ Pasifisme berarti Jepang sebagai pelaku kejahatan selama PD II harus menanggalkan atribut perangnya, pelarangan dalam menggunakan ancaman kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik-konflik internasional serta hal-hal yang menimbulkan potensi perang.

Jepang tidak boleh lagi menggunakan militernya sebagai alat untuk mempertahankan perdamaian negaranya didalam sengketa internasional. Semua kebutuhan militer Jepang merupakan tanggung jawab AS sebagai negara yang menduduki Jepang.

Kerisauan awal Jepang mengenai keamanan Jepang setelah diduduki oleh AS adalah pada saat pecahnya Perang Korea pada tahun 1950. Perang antara Korea bagian Selatan yang didukung oleh AS dan Korea bagian Utara yang didukung oleh Uni Soviet mengakibatkan AS harus mengirim pasukan ke Korea. Sebanyak 75.000 personil pasukan AS di Jepang dikirim ke Semenanjung Korea. Kondisi Asia Pasifik yang kacau membuat Jepang khawatir atas stabilitas keamanan dalam negeri Jepang. Oleh karena itu, AS yang tidak bisa membagi

¹⁸ *Ibid*, hal. 14.

penjagaan keamanan Jepang dan Semenanjung Korea, meminta Jepang untuk membentuk polisi nasional cadangan (*keitai yobitai*) sebagai alat penjaga keamanan dalam negeri Jepang.

Pada tahun 1952 merupakan tahun terakhir AS menduduki Jepang. AS pun ditarik dari Jepang. Penarikan pasukan AS dari Jepang diresmikan dengan menyerahkan kedaulatan Jepang pada tanggal 28 April 1952. Demi keamanan Jepang, pemerintah Jepang yang tidak memiliki angkatan bersenjata mendesak AS untuk menyetujui terbentuknya Badan Pertahanan Nasional. Pada akhirnya, bulan Juli 1954 dengan persetujuan AS, Jepang membentuk SDF (*Self Defense Forces*) atau pasukan bela diri serta undang-undang SDF. SDF dinaungi oleh Badan Pertahanan Jepang. Misi SDF adalah untuk pertahanan Jepang terhadap agresi langsung dan tidak langsung, serta membina perdamaian, kemerdekaan, dan keamanan Jepang. SDF dibatasi oleh pasal 9 konstitusi 1947 yaitu hanya bersifat defensif semata.

Berakhirnya pendudukan AS di Jepang tidak serta merta membuat AS lepas peranannya terhadap Jepang. Pembentukan SDF dirasa belum cukup oleh Jepang, karena selain bersifat defensif, SDF juga tidak memiliki peralatan yang lengkap untuk pertahanan Jepang. Oleh karena itu, untuk melindungi negaranya, Jepang bekerjasama dengan AS di bidang militer. Kerjasama tersebut terlihat dari kesepakatan perjanjian AS-Jepang yaitu Perjanjian Keamanan (*Security Treaty*) yang ditandatangani pada tanggal 28 April 1951 di San Fransisco.²⁰ Kelemahan dari perjanjian ini adalah tidak menjamin pasukan AS akan tetap bertahan di

²⁰ 1995

Jepang. Pada akhirnya, dokumen ini direvisi pada bulan September 1958 saat kunjungan PM Nobusuke Kishi (1957-1960) ke Amerika Serikat. Pada tanggal 19 Januari 1960, ditandatangani perjanjian keamanan AS-Jepang baru di Washington yaitu "*Treaty of Mutual Cooperation and Security Between The United States and Japan*".²¹ Perjanjian ini mewajibkan AS untuk membantu SDF dalam menjamin serta mempertahankan keamanan Jepang dari serangan militer, termasuk mengenai kewajiban AS untuk membiayai keperluan keamanan Jepang.

Pada awal pelaksanaan konstitusi 1947 serta perjanjian militer dengan AS, merupakan sesuatu yang baik untuk Jepang terutama dibidang perekonomiannya. Pemerintahan Jepang tidak diharuskan lagi memikirkan militer mereka karena keamanan Jepang menjadi kewajiban AS yang ditempatkan di Jepang oleh Sekutu, sehingga anggaran militer Jepang dapat dialihkan kepada perkembangan ekonomi. Peralihan era militer menuju era demokrasi membuat Jepang menjadi negara yang maju. Jepang dengan menggunakan konstitusi 1947 juga menjadi negara yang maju dalam perekonomiannya. Pada tahun 1999 saja, GNP Jepang mencapai US\$ 36,984 perkapita,²² padahal pada tahun 1979 masih US\$ 6,797 perkapita.²³

Pada era PM Abe (2006-sekarang), pemerintah Jepang berupaya untuk meningkatkan kekuatan militer Jepang. Usaha tersebut diwujudkan dengan membentuk Departemen Pertahanan Jepang (Dephan). Dephan secara resmi dibentuk pada tanggal 9 Januari 2007. Secara resmi Badan Keamanan Jepang diubah menjadi Departemen Pertahanan Jepang yang memiliki kekuatan yang

²¹ *Ibid.*

²² www.prij.org, *Ekonomi Jepang*.

²³

lebih besar karena Dephan berhak merencanakan anggaran sendiri dan mengajukan rancangan undang-undang.²⁴ Dephan juga dapat membuat kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang sendiri, tanpa campur tangan dari AS,²⁵ sehingga Dephan yang menyimpang dari pasal 9 konstitusi 1947 pun dapat mengadakan latihan bersama serta pengiriman pasukan secara kolektif ke luar negeri. Badan Pertahanan Jepang yang masih dalam batasan pasal 9 konstitusi 1947 hanya bersifat defensif, bukan merupakan pasukan perang. Badan Pertahanan hilang hak perangnya dan dilarang memiliki potensi perang. Badan Pertahanan ini bertugas untuk mempertahankan Jepang terhadap agresi langsung dan tak langsung, untuk menjaga perdamaian, kemerdekaan, dan keamanan Jepang, serta untuk membina ketertiban umum apabila keadaan membutuhkan.²⁶

D. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu: “Mengapa Perdana Menteri Shinzo Abe memutuskan untuk membentuk Departemen Pertahanan Jepang?”.

E. Kerangka Teori

Politik luar negeri merupakan sikap dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternal, strategi dasar untuk mencapai tujuan kepentingan nasional yang harus dicapai diluar batas wilayahnya, dan itu diterapkan dalam sejumlah

kebijakan politik luar negerinya.²⁷ Politik luar negeri suatu negara terdiri dari dua elemen, yaitu kepentingan nasional yang ingin dicapai dan alat untuk mencapai kepentingan nasional tersebut.²⁸ Politik luar negeri merupakan perpanjangan tangan dari politik dalam negerinya atau bisa disebut juga dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai dan dilakukan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Jadi bisa dikatakan bahwa esensi dari politik luar negeri adalah kepentingan nasional.

Sesuai dengan konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton (1982:128), bahwa:

The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy and the national interest of a state is typically highly generalized conception of those elements that constitute the state's most vital need.

Kebijakan negara merupakan pemikiran pemerintah demi kepentingan nasional. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus disesuaikan dengan kepentingan nasional negara tersebut.

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara didalam politik luar negerinya meliputi:

- a. *Self Preservation,*
- b. *Security,*
- c. *National Well-being,*
- d. *National Prestige,*

²⁷ Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe. *Introduction to International Relation: Power*

e. *Protection and Advancement of Ideology,*

f. *The Pursuit of Power.*²⁹

Pembentukan Dephan oleh PM Abe pun berdasarkan kepentingan nasional Jepang. Pembentukan Dephan Jepang oleh PM Abe memiliki tujuan untuk *security* dan *national prestige*. Masalah uji coba Korea Utara dan peningkatan kekuatan militer Cina menjadi alasan PM Abe untuk membentuk Dephan yang memiliki kepentingan sebagai keamanan dalam negeri Jepang sendiri. Sebagai antisipasinya PM Abe membentuk Dephan, Jepang dapat memiliki angkatan bersenjata yang bebas melakukan peningkatan kekuatan demi menjaga keamanan dalam dan luar Jepang.

Masalah *national prestige* terlihat dari pasal 9 konstitusi 1947, yang membatasi gerak-gerik militer Jepang. Konstitusi yang dibuat oleh AS ini berarti Jepang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan militer sendiri untuk melindungi negaranya sendiri. Jika PM Abe tidak mengambil tindakan pembentukan Dephan sebagai langkah awal untuk merevisi konstitusi 1947 terutama bidang militernya, maka Jepang akan terus berada di bawah bayang-bayang militer AS. Jepang tidak bebas untuk meningkatkan kekuatan militernya sendiri, padahal jika dilihat dari kekuatan militer, Jepang mempunyai kekuatan yang besar dan tidak perlu lagi bergantung dengan AS. Sebagai bukti Jepang memiliki anggaran untuk militernya sebesar ¥ 45.5 trillion pada tahun 1992.³⁰ Namun sesuai dengan perjanjian keamanan Jepang-AS, Jepang tidak boleh

²⁹ Ibid, hal 227.

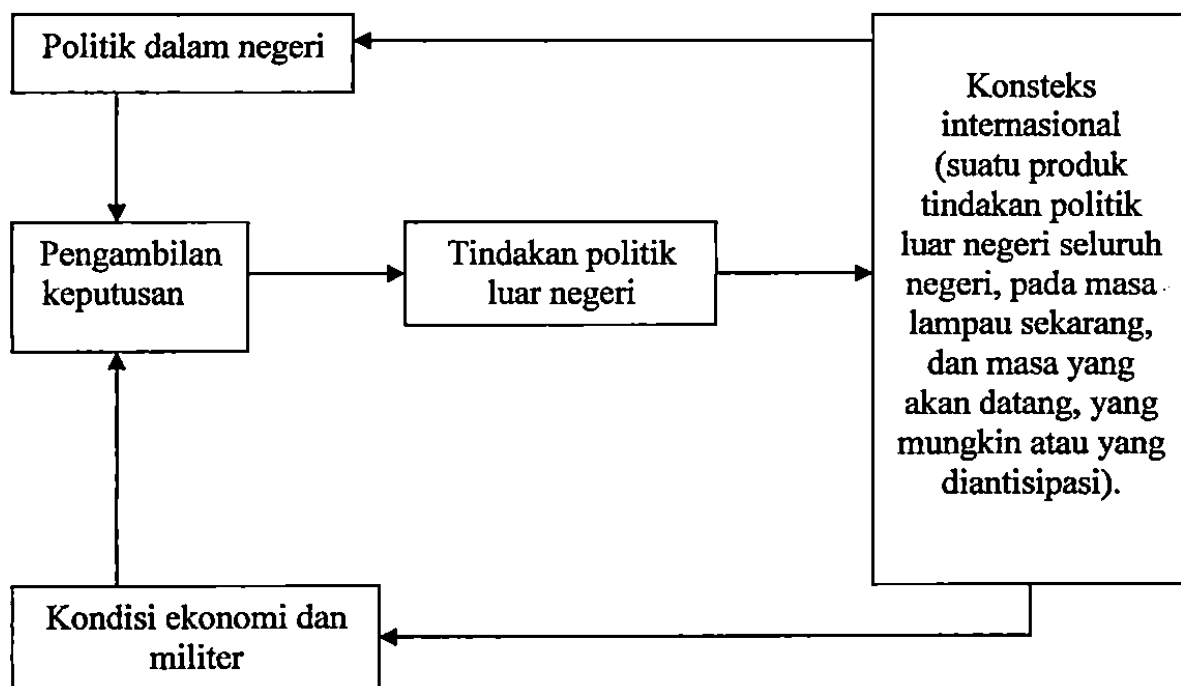
politik luar negeri. Pertama kondisi politik luar negeri, kedua kemampuan ekonomi dan militer, yang ketiga konteks internasional, yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem itu.

Dengan demikian, pengambilan keputusan tersebut ditentukan oleh tiga faktor:

- a). Kondisi politik dalam negeri para pengambil keputusan,
- b). Kemampuan ekonomi dan militer,
- c). Konteks internasional, yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem itu.

GAMBAR 1.1

Empat Determinan saling Mempengaruhi didalam Tindakan Politik Luar Negeri



Sumber: William D. Coolin dan Mercedes Marhun, hal. 30

a). Kondisi Dalam Negeri

Berbicara mengenai kondisi dalam negeri Jepang maka secara otomatis akan membahas tentang kondisi politik dalam negerinya. Bentuk pemerintahan Jepang adalah parlementer. Sistem pembentukan pemerintahan melalui pemilihan umum, dimana menganut sistem multi partai.³¹ Dalam perpolitikan Jepang, partai yang lebih dominan dalam pemerintahan Jepang adalah partai LDP (*Liberal Democratic Party*). Dalam hal pembentukan Dephan Jepang, LDP banyak memberikan pengaruh terhadap Shinzo Abe. Besarnya pengaruh LDP terhadap keputusan PM Abe tersebut karena selain PM Abe sebagai ketua LDP, anggota LDP juga banyak menduduki kursi di Diet.

Alasan pembentukan Dephan oleh PM Abe dari dalam negeri yaitu untuk mempertahankan kedudukan LDP atau *Liberal Democratic Party* (partai yang membawa PM Shinzo Abe masuk kedalam kursi perdana menteri) didalam pemerintahan.

Dengan menggunakan alasan peningkatan uji coba nuklir Korea Utara, LDP juga menuntut untuk membentuk Dephan dengan tujuan mempertahankan kedudukannya dalam Diet. Hal ini dikarenakan orang-orang yang duduk di dalam kursi pemerintahan dapat pula membuat kebijakan-kebijakan pemerintah. LDP ingin rakyat Jepang menyadari bahwa dengan membentuk Dephan Jepang akan semakin maju. Pembentukan Dephan tidak akan mengganggu kemajuan ekonomi Jepang, justru sebaliknya perekonomian Jepang akan semakin maju dengan

³¹ *Jepang Sebagai pedoman Buku Saku*. Kedutaan Besar Jepang, hal. 16.

c). Lingkungan Internasional

Kondisi internasional sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Kondisi internasional, baik yang berisiko secara langsung, maupun tidak langsung yang mempengaruhi perilaku suatu negara.

Akhir-akhir ini banyak negara di kawasan Asia Timur yang berusaha untuk meningkatkan kekuatan militernya. Salah satunya adalah Cina dan Korea Utara. Jepang yang terhambat kekuatan militernya dengan adanya pasal 9 konstitusi 1947, berusaha untuk merevisi konstitusi tersebut dengan langkah awal yaitu dengan membentuk Departemen Pertahanan Jepang.

Dengan membentuk Dephan, Jepang dapat bebas meningkatkan kemampuan militernya. Jepang yang telah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, tidak mau lagi dipandang sebagai negara yang maju didalam ekonomi saja tetapi pasif didalam pertahananya. Dengan nuklir Korea Utara dan ancaman dari peningkatan militer China, Jepang tidak ingin dianggap sebagai negara yang tidak dapat melindungi negaranya sendiri tanpa bantuan dari AS. Korea Utara menyatakan telah berhasil melaksanakan uji coba persenjataan nuklir yang pertama kali di bawah tanah pada tanggal 9 Oktober 2006.³³ Dengan adanya uji coba nuklir dari Korea Utara ini, pemerintah Jepang khawatir jika sewaktu-waktu Korea Utara menyerang Jepang, maka Jepang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan serangan balasan.

³³ www.dbtionline.com.

AS juga setuju atas peningkatan kekuatan militer yang dilakukan oleh Jepang, walaupun AS sendiri yang membuat konstitusi 1947.³⁴ Oleh karena itu, AS dan pemerintah yang sedang berkuasa, LDP menjalin hubungan timbal balik. AS tidak ingin menanggung sendiri anggaran belanja militer Jepang, sedangkan Jepang ingin melindungi negaranya sendiri.

Alasan lain dalam pembentukan Dephan adalah untuk menjadi anggota tetap DK PBB. Isu penambahan anggota tetap DK PBB dari lima negara menjadi tujuh negara telah mencuat dari tahun 2005, namun gagal dilaksanakan. Jepang tidak mau, apabila isu tersebut menjadi kenyataan, Jepang tidak dapat dipilih menjadi anggota tetap DK PBB karena memiliki batasan-batasan terhadap aktivitas militernya. Oleh karena itu, PM Abe membentuk Dephan sebagai langkah menuju posisi tersebut.

Ketiga determinan tersebut merupakan hal-hal yang mempengaruhi PM Abe dalam membentuk Dephan, namun penulis hanya akan menerangkan lebih lanjut dua determinan yang lebih utama dalam alasan PM Abe untuk membentuk Dephan. Dua alasan tersebut adalah kondisi dalam negeri Jepang dan lingkungan internasional.

F. Hipotesa

Ada beberapa hal yang mempengaruhi Jepang di Era PM Abe didalam membentuk Departemen Pertahanan Nasional, yaitu:

- A. Faktor Internal, yaitu tuntutan LDP untuk mempertahankan posisinya dalam pemerintahan Jepang.
- B. Faktor Eksternal.
 - Peningkatan uji coba nuklir Korea Utara dan peningkatan kekuatan militer Cina di kawasan Asia-Pasifik yang menjadi ancaman.
 - Keinginan Jepang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam penulisan tugas akhir ini yaitu studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data sekunder dari buku-buku, jurnal, majalah dan media massa seperti televisi, surat kabar serta internet yang memuat data yang sesuai dengan penulisan ini.

H. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada masa PM Shinzo Abe dalam alasan membentuk Departemen Pertahanan Nasional Jepang, namun tidak menutup kemungkinan mengambil data-data dari tahun-tahun sebelumnya yang dirasakan

I. Sistematika Penulisan

Penjabaran-penjabaran mengena sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut:

BAB I : Berisi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang gambaran umum pertahanan Jepang pada pasca Perang Dunia II. Tentang bagaimana peranan AS didalam pertahanan Jepang masa pendudukannya dan pasca pendudukan AS.

BAB III: Mengenai reaksi-reaksi yang timbul dari rencana revisi konstitusi 1947 dan pembentukan Departemen Pertahanan Jepang baik dari dalam maupun dari luar Jepang serta baik yang pro maupun yang kontra dalam pembentukan Departemen Pertahanan Nasional Jepang tersebut.

BAB IV: Berisi tentang alasan-alasan serta tujuan-tujuan PM Shinzo Abe dalam membentuk Departemen Pertahanan.

BAB V: Berisi tentang kesimpulan dari seluruh penulisan ini.